

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Mandala belum berjalan secara optimal dan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang diatur dengan kondisi di lapangan. Secara administratif program telah dilaksanakan, namun dalam praktiknya belum berjalan secara efektif, yang ditandai dengan ketidaktepatan sasaran akibat ketidaksesuaian data DTKS dengan kondisi riil masyarakat. Hal ini diperkuat oleh temuan dari masyarakat, baik penerima maupun yang tidak menerima bantuan, yang menunjukkan masih adanya penerima yang tidak tepat sasaran serta masyarakat layak yang belum terakomodasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini terutama disebabkan oleh ketidaksesuaian data DTKS dengan kondisi riil masyarakat, yang diperparahi oleh keterbatasan kuota, mekanisme pemeringkatan, serta sistem data yang terpusat. Selain itu, proses pelaksanaan yang belum merata, ketaatan pelaksana yang masih bersifat formal, serta belum optimalnya fungsi bantuan sosial dalam aspek ketepatan sasaran dan pemberdayaan masyarakat turut mempengaruhi pelaksanaan program., sehingga tujuan program dalam menjamin ketepatan sasaran belum tercapai secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil akhir penelitian yang telah dirumuskan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan temuan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Mandala belum berjalan optimal, disarankan kepada pelaksana kebijakan, khususnya pemerintah desa, pendamping PKH, dan Dinas Sosial, untuk meningkatkan ketepatan sasaran melalui pemutakhiran data DTKS secara berkala yang disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat. Selain itu, diperlukan peran yang lebih aktif dari pelaksana di lapangan dalam menindaklanjuti permasalahan masyarakat, sehingga pelaksanaan program tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjamin terpenuhinya hak masyarakat secara nyata.
2. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, disarankan adanya penguatan koordinasi antar pelaksana kebijakan serta peningkatan responsivitas terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan dalam mekanisme penetapan penerima manfaat, khususnya terkait sistem data terpusat, pemeringkatan, dan keterbatasan kuota, agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi lapangan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan mampu mencapai tujuan program secara tepat sasaran.